

PERANAN DINAS PERTANIAN DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI KECAMATAN MANUJU KABUPATEN GOWA

Sholihin Ali¹, Muhammad Idris², Anwar Parawangi²

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar
Jl Sultan Alauddin No 259 Makassar 90221
Telp. 0411-866972 ext. 107. Fax. 0411-8655888
sholihinali@yahoo.co.id

² Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar
Jl Sultan Alauddin No 259 Makassar 90221
Telp. 0411-866972 ext. 107. Fax. 0411-8655888
muh.idris@gmail.com parawangi.anwar@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the role of the Department of Agriculture in the empowerment of farmers' groups in the District Manuju Gowa and identify the factors supporting and inhibiting factors in the empowerment of farmer groups. This type of research used was descriptive research and data analysis is the analysis of qualitative data. While data collection techniques used by researchers is the observation, interview and documentation. The results of this study indicate that the role of the Department of Agriculture in the empowerment of farmers' groups in the District Manuju Gowa which include the delivery of training and counseling, help seed and fertilizer, and assistance agricultural technologies. The factors supporting in the empowerment of farmer groups in the District Manuju namely the support of the Central Government in the form of budget allocations in the state budget, help the Provincial Government, District Government. Then factor inhibiting in the empowerment of farmers' groups in the District Manuju is the application of what is obtained by the groups of training and counseling is still lacking because most still use traditional patterns of farming. Besides the lack of seed stock and fertilizer from the manufacturer is still less.

Keywords: *The role, the Department of Agriculture, Empowerment, Farmers*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan Dinas Pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan faktor faktor penghambat dalam pemberdayaan kelompok tani. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif dan analisis data yaitu analisis data kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Dinas Pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa yang meliputi pemberian pelatihan dan penyuluhan, Bantuan bibit dan pupuk, dan bantuan teknologi pertanian. Adapun faktor pendukung dalam pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Manuju yaitu adanya bantuan dari Pemerintah Pusat berupa alokasi anggaran dalam APBN, bantuan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten. Kemudian faktor yang menghambat dalam pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Manuju adalah pengaplikasian dari apa yang didapatkan oleh kelompok tani dari pelatihan dan penyuluhan itu masih kurang karena kebanyakan masih menggunakan pola-pola tradisional dalam bertani. Selain itu kurangnya stok bibit maupun pupuk dari produsen.

Kata Kunci : *Peranan, Dinas Pertanian, Pemberdayaan, Kelompok Tani*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu Negara yang berbasis agraris, mayoritas penduduknya hidup dari hasil pertanian. Meskipun dipahami bahwa tidak sedikit pula diantara petani hanya berstatus petani penggarap dibawah 0,25 Ha. Untuk itu, sangat tepat jika pemerintah menganggarkan dalam APBN untuk pertanian. Pada zaman Soeharto Indonesia sempat menjadi salah satu Negara yang mampu untuk berswasembada beras, hal ini dapat dilihat bahwa dahulu petani Indonesia hidupnya jauh lebih makmur dari pada petani sekarang.

Banyak orang yang bilang bahwa Indonesia merupakan Negara yang kaya akan beras, namun melihat kenyataannya masih banyak sekali orang yang mengalami kelaparan. Ini disebabkan belum meratanya ketahanan pangan di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu tugas negara untuk mampu mensejahterakan rakyatnya.

Adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/KPTS/OT.160/4/2007, pada tanggal 13 april 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani merupakan salah satu bagian dari peranan pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dalam hal ini petani, petani diatur dan ditata dalam wadah kelompok tani di tiap desa di tingkat Kecamatan sehingga memudahkan proses penyuluhan pertanian. Dan ini juga sejalan dengan adanya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Petani. Kemudian dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang Revitalisasi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (RPPK) maka pemerintah mewujudkan revitalisasi pertanian yang luas, sehingga mampu mencerdaskan para petani, dapat merubah sistem pertanian untuk lebih

maju dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Dalam hal ini diperlukan perangkat penyuluh pertanian yang proaktif dengan petani dan penyuluh yang profesional. Dukungan sumber daya manusia berkualitas melalui penyuluhan pertanian dengan pendekatan kelompok yang dapat mendukung sistem agribisnis berbasis pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan).

Sehubungan dengan hal itu perlu dilakukan pemberdayaan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan kelompok tani menjadi kelompok yang kuat dan mandiri untuk meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya. Pemberdayaan kelompok tani di arahkan pada pemberian pelatihan dan penyuluhan, pemberian bantuan bibit dan pupuk, dan pemberian bantuan teknologi pertanian kepada kelompok tani. Selain itu pembinaan kelompok tani diharapkan dapat membantu dan menggali potensi, memecahkan masalah usaha tani anggotanya secara lebih efektif dan memudahkan dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya.

Pemberdayaan kelompok tani merupakan konsep yang dikembangkan untuk memperkuat kemandirian petani. Dimana pemberdayaan kelompok tani meliputi peningkatan pengetahuan dan kemampuan petani melalui penyuluh dan pelatihan, pengembangan jaringan usaha melalui kerjasama, koordinasi dan komunikasi serta peningkatan peran pembinaan melalui motivasi, fasilitasi dan bimbingan teknis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273/KPTS/OT.160/4/2007 tentang pedoman penumbuhan pengembangan kelompok tani dan gabungan kelompok tani, menjelaskan pada tanggal 11 juni

2005 Presiden RI telah mencanangkan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan (RPPK) sebagai salah satu *triple track* strategi dari Kabinet Indonesia Bersatu dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan daya saing ekonomi nasional dan menjaga kelestarian sumber daya pertanian, perikanan dan kehutanan.

Kelompok tani sangat berperan dalam menjembatani dan menerjemahkan program-program pemerintah dibidang peningkatan produksi pertanian. Dengan demikian, pembinaan kelompok tani dipedesaan merupakan hal penting dalam rangka membangkitkan, mengembangkan dinamika dan kemandirian kelompok tani di pedesaan.

Dalam hal ini kelompok tani merupakan kumpulan petani-petani yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya.

Dengan adanya kelompok tani maka akan ada kemudahan petani dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada bidang pertaniannya, selain itu juga dapat memberikan kelanggengan usaha pada petani serta lebih terorganisir lagi terhadap petani. Sehingga petani dapat lebih kreatif dan mandiri dalam pengelolaan pertanian selain itu juga petani dapat meningkatkan produksi pertaniannya dengan semaksimal mungkin.

Dengan keberadaan kelompok tani pada daerah tersebut maka diharapkan akan tumbuh rasa keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktifitas usaha tani

dan kesejahteraan anggotanya, serta dapat juga mensejahterakan anggota keluarganya.

Dalam peningkatan kesejahteraan petani melalui kelompok tani banyak aspek yang harus diperhatikan baik itu produktivitas usaha tani maupun intensitas tanam serta peningkatan akses petani ke pasar *input* sehingga mendatangkan *output* yang efisien.

Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidupnya dalam bidang pertanian dan tergabung dalam kelompok tani yang tersebar di beberapa Kecamatan. Di Kecamatan Manuju sendiri terdapat 127 kelompok tani (data awal dari Dinas Pertanian) dan tersebar di tujuh desa yaitu yaitu Desa Pattallikang, Desa Tanah Karaeng, Desa Moncongloe, Desa Bilalang, Desa Tamalatea, Desa Manuju dan Desa Tassese. Dari data ini dapat dijelaskan bahwa kelompok tani yang ada di Kecamatan Manuju ini memerlukan peranan dari Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian dalam melakukan pemberdayaan kepada kelompok tani. Kelompok tani di Kecamatan Manuju ini masih memiliki berbagai persoalan diantaranya dengan rendahnya tingkat pendidikan dari anggota kelompok tani maka terkadang kurang mampu menerima inovasi baik berupa cara tanam dari pelatihan maupun penyuluhan. Banyaknya petani yang masih membeli bibit maupun pupuk di agen-agen atau distributor. Kemudian persoalan minimnya bantuan berupa mesin yang bisa membantu kelompok tani dalam mengelola lahan persawahan maupun lahan perkebunan. Persoalan diatas mengakibatkan kesejahteraan petani hanya menjadi impian saja ketika tidak dibenahi.

Hal inilah yang membuat peneliti merasa tertarik untuk meneliti

bagaimana sebenarnya Peranan Dinas Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kecamatan Manuju. Berdasarkan uraian latar belakang diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai “Peranan Dinas Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa”.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa, dan untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat Dinas Pertanian dalam melakukan pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

B. KONSEP PERANAN PEMERINTAH

Definisi peranan menurut Departemen Pendidikan Nasional (2002:854) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga memberikan arti peranan, “tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa”. Peranan merupakan segala sesuatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang bisa mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa yang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Soejono Soekanto (Soekanto, 2002:243) Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur strategis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu

posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Menurut pengertian di atas, peranan merupakan status seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, peranan seseorang dalam penerapannya di masyarakat harus dibedakan dengan posisinya dalam masyarakat tersebut. Suatu peranan seseorang sangat penting dalam sebuah organisasi masyarakat.

Peranan seseorang harus difungsikan secara optimal sesuai dengan posisinya dalam organisasi masyarakat itu. Peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
- 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Soekanto, 2004:244).

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola daerahnya sendiri dengan baik dengan penuh tanggung jawab dan jauh dari praktik-praktik korupsi. Adapun yang menjadi kewajiban Pemerintahan Daerah yaitu:

- a) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi;

- d) Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f) Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h) Mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k) Melestarikan lingkungan hidup;
- l) Mengelola administrasi kependudukan;
- m) Melestarikan nilai sosial budaya;
- n) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.

Kewajiban Daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan azas-azas pemerintahan maka dalam pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, efisien, transparan, bertanggungjawab, tertib, adil, patuh, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, pemerintah daerah harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah agar penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Pemerintah daerah terdiri dari Gubernur, Bupati, Walikota dibantu dengan adanya Dinas-Dinas yang mempunyai peranan yang cukup sentral dalam pemeritahan. Menurut Kaho, dalam bukunya *Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia*,

Dinas-dinas Daerah sekalipun tugas dan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa terlalu memperhitungkan untung-rugi, tapi dalam batas-batas tertentu dapat didayagunakan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan jasa dengan imbalan. Dari sinilah Daerah dapat menambah pendapatan aslinya (PAD). (Kaho, 2002:173-174).

2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/ kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan (Djohani, 2003).

Konsep Pemberdayaan Masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang telah banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia barat. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Sosial di Kopenhagen Tahun 1992 juga telah memuatnya dalam berbagai kesepakatannya. Namun, upaya mewujudkannya dalam praktik pembangunan tidak selalu berjalan mulus. Banyak pemikir dan praktisi yang belum memahami dan mungkin tidak meyakini bahwa konsep pemberdayaan merupakan alternatif pemecahan terhadap dilema-dilema pembangunan yang dihadapi. Mereka yang berpegang pada teori-teori pembangunan model lama juga tidak mudah untuk menyesuaikan diri dengan pandangan-pandangan dan tuntutan-tuntutan keadilan. Mereka yang tidak nyaman terhadap konsep partisipasi dan demokrasi dalam pembangunan tidak akan merasa tenteram dengan konsep pemberdayaan ini.

Lebih lanjut, disadari pula adanya berbagai bias terhadap pemberdayaan masyarakat sebagai suatu paradigma baru pembangunan. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi masyarakat setempat dibuat ditingkat lokal, oleh masyarakat yang memiliki identitas yang diakui peranannya sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan.

1. Fokus utama pengelolaan sumber daya lokal adalah memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam mengarahkan aset-aset yang ada dalam masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhannya;
2. Toleransi yang besar terhadap adanya variasi. Oleh karena itu mengakui makna pilihan individual, dan mengakui proses pengambilan keputusan yang dengan sentralistik;
3. Budaya kelembagaan ditandai oleh adanya organisasi-organisasi yang otonom dan mandiri, yang saling berinteraksi memberikan umpan balik pelaksanaan untuk mengoreksi diri pada setiap jenjang organisasi;
4. Adanya jaringan koalisi dan komunikasi antara para pelaku dan organisasi lokal yang otonom dan mandiri, yang mencakup kelompok penerima manfaat, pemerintah lokal, lokal dan sebagainya, yang menjadi dasar bagi semua kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat pengawasan dan penguasaan masyarakat atas berbagai sumber yang ada, serta kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya setempat.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (*people centered development*) melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal, yang merupakan mekanisme perencanaan yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial dan strategi perumusan program. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya.

b. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan mengerahkan sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (afektif, kognitif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan, yang dilengkapi dengan kecakapan dan keterampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhan tersebut. (Ambar Teguh S, 2004:80-81)

c. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya memberdayakan masyarakat tersebut dapat dilihat dari tiga sisi yaitu;

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah.

Kedua, Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

Pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras,

hemat, keterbukaan dan pertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat didalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Jadi esensi pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga termasuk penguatan pranata-pranatanya.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.

3. Pengertian Kelompok Tani

Kelompok tani merupakan lembaga yang menyatukan para petani secara horizontal, dan dapat dibentuk beberapa unit dalam satu desa. Kelompok tani juga dapat dibentuk berdasarkan komoditas, area pertanian, dan gender.

Pengembangan kelompok tani dilatarbelakangi oleh kenyataan kelemahan petani dalam mengakses berbagai kelembagaan layanan usaha, misalnya lemah terhadap lembaga keuangan, terhadap lembaga pemasaran, terhadap lembaga penyedia sarana produksi pertanian serta terhadap sumber informasi (Saptana dkk; 2004).

Kelompok tani merupakan lembaga yang menyatukan para petani secara horizontal dan vertikal (Suradisastira K, 2008). Berbagai kesalahan dalam pengembangan kelembagaan selama ini yaitu hampir tiap program pembangunan pertanian dan pengembangan masyarakat pedesaan membentuk satu kelembagaan yang baru.

Secara konseptual tiap kelembagaan petani yang dibentuk dapat memainkan peran tunggal ataupun ganda. Khusus untuk kegiatan ekonomi, terdapat banyak lembaga pedesaan yang diarahkan sebagai lembaga ekonomi, diantaranya adalah kelompok tani, koperasi dan kelompok usaha agrobisnis.

Dalam rangka pembangunan sub sektor pertanian, kelompok tani adalah sebagai berikut: Anggota pengurus kelompok tani pertanian, baik yang merupakan kegiatan proyek maupun kegiatan pembangunan swadaya. Merupakan pengorganisasian petani yang mengatur kerjasama dan pembagian tugas anggota maupun pengurus dalam kegiatan usahatani kelompok di hamparan kebun. Besaran kelompok tani disesuaikan dengan jenis usahatani dan kondisi di lapangan, dengan jumlah anggota berkisar 20-30 orang. Keanggotaan kelompok tani bersifat non formal. Pemilihan pengurus tiap kelompok tani dan anggotanya dilakukan secara musyawarah sehingga diperoleh kesepakatan kelompok dan dukungan masyarakat dan instansi terkait. Kepengurusan kelompok tani minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan

Bendahara serta dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kelompok. Adapun tugas dan tanggung jawab anggota kelompok tani adalah: (1) Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan usaha tani; (2) Wajib mengikuti dan melaksanakan petunjuk pengurus kelompok tani dan petugas/penyuluh serta kesepakatan yang berlaku; (3) Wajib bekerja sama dan akrab antar sesama anggota, pengurus maupun dengan petugas/penyuluh; (4) Hadir pada pertemuan berkala dan aktif memberikan masukan, saran dan pendapat demi berhasilnya kegiatan usaha tani kelompok.

Selanjutnya adapun tugas dan tanggung jawab pengurus kelompok tani yakni: (1) Membina kerjasama dalam melaksanakan usaha tani dan kesepakatan yang berlaku dalam kelompok tani. Dalam hal ini pengurus melakukan koordinasi terhadap anggota dengan mengidentifikasi jumlah anggota kelompok tani yang bertambah atau berkurang; dan (2) Wajib mengikuti petunjuk dan bimbingan dari petugas/penyuluh untuk selanjutnya diteruskan pada anggota kelompok. Pengurus wajib menyampaikan informasi yang disampaikan oleh penyuluh kepada kelompok taninya.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Adapun lokasi penelitian yaitu bertempat di Kecamatan Manuju dan Kantor Dinas Pertanian selaku Dinas yang menaungi Kelompok Tani. Penentuan lokasi ini antara lain didasarkan atas pertimbangan peneliti bahwa daerah tersebut terdapat banyak kelompok tani yang bergabung dalam menyiasati atau bersatu dalam memecahkan masalah yang ada pada mereka.

Selanjutnya penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, karena penelitian ini berupaya untuk memahami peranan Dinas Pertanian dalam

pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang berkaitan dengan objek penelitian tentang bagaimana membuat, menggambarkan, meringkas berbagai kondisi dan situasi yang timbul di lapangan. Dengan menetapkan fokus pada masalah peranan dinas pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani yang akan diteliti diharapkan nantinya peneliti akan mendapat data yang maksimal untuk menggambarkan fenomena aktual yang terjadi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan kelompok tani yang meliputi pemberian penyuluhan dan pelatihan, pemberian bantuan bibit dan pupuk, dan bantuan teknologi pertanian bertujuan agar para kelompok tani bisa sejahtera, menjadi lebih berdaya dan lebih mudah dalam meningkatkan potensi serta kualitas pertanian yang dikelola. Kelompok tani merupakan aset yang sangat berharga dalam mendukung pembangunan pertanian sehingga harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.

Dinas Pertanian merupakan instansi pemerintah daerah yang diharapkan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal terutama dalam melakukan pemberdayaan kelompok tani. Pemberian bantuan-bantuan tentunya sangat di butuhkan oleh kelompok tani.

1. Peranan Dinas Pertanian dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

Kelompok tani di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa terdiri 127 kelompok tani dan tersebar di beberapa Desa yaitu:

1. Desa Pattallikang sebanyak 30 kelompok tani;
2. Desa Tanah Karaeng sebanyak 16 kelompok tani;

3. Desa Moncongloe sebanyak 12 kelompok tani;
4. Desa Bilalang sebanyak 14 kelompok tani;
5. Desa Manuju sebanyak 22 kelompok tani;
6. Desa Tassese sebanyak 17 kelompok tani;
7. Desa Tamalatea sebanyak 16 kelompok tani.

Dengan jumlah yang banyak tentunya membutuhkan adanya pengarahannya dari pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu meningkatkan hasil pertanian di daerah tersebut (Baca: Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa). Pemberdayaan kelompok tani yang dilakukan oleh Dinas setempat (Baca: Dinas Pertanian Kabupaten Gowa) yakni:

1) Pelatihan dan Penyuluhan;

Peranan Dinas Pertanian dalam pelatihan dan penyuluhan yakni Dinas Pertanian memberikan pendidikan nonformal yang berkaitan dengan cara-cara berusaha tani yang baik yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan khusus dari kelompok tani. Peranan Dinas Pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani dituntut untuk memberikan pelatihan dan penyuluhan dalam mengatasi permasalahan ataupun kendala-kendala yang di hadapi oleh para petani yang tergabung dalam kelompok tani.

Pelatihan dan penyuluhan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan yang memadai dari petani dalam bidang pertanian, memotivasi petani untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan pertanian, kemudian menerapkan materi yang diperoleh petani dari pelatihan dan penyuluhan tersebut. Oleh karena itu pelatihan dan penyuluhan kepada petani sangatlah penting dan perlu untuk dilaksanakan

demi pembangunan dan pengembangan di sektor pertanian.

Berikut adalah kutipan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gowa terkait dengan peranan Dinas Pertanian dalam pemberian pelatihan dan penyuluhan kepada kelompok tani di kecamatan Manuju:

"Iya jadi saya sebagai Kadis Pertanian Kabupaten Gowa telah melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pengembangan kapasitas dari kelompok tani dengan cara perumusan kebijakan-kebijakan teknis. Termasuk pelatihan dan penyuluhan itu sudah terprogram baik di Dinas Pertanian dan sudah dijalankan oleh para penyuluh di tiap-tiap desa yang ada di kecamatan Manuju, mengenai waktu pelaksanaan nya itu dijadwalkan setiap musim tanam dengan melibatkan penyuluh pertanian lapangan (PPL), kelompok tani dan anggotanya di tiap desa. Dan bukan cuma di kecamatan Manuju pelatihan dan penyuluhan ini dilaksanakan tetapi di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa karena ini sejalan dengan misi kami di Dinas Pertanian yaitu salah satunya memperkuat kelembagaan pertanian". (Wawancara, HZ).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kadis Pertanian dapat dideskripsikan bahwa dalam meningkatkan pengetahuan dan pengembangan kapasitas kelompok tani maka perlu adanya pemberian pelatihan dan penyuluhan kepada kelompok tani. Meski demikian, Kadis Pertanian Kabupaten Gowa telah menyusun kebijakan-kebijakan yang didalamnya sudah termasuk pelatihan dan penyuluhan yang dapat membantu petani dalam pengembangan produksi

pertanian ketika menerapkan apa yang didapatkan dalam pelatihan dan penyuluhan tersebut.

2) Bantuan Bibit dan Pupuk;

Peranan Dinas Pertanian dalam bantuan bibit dan pupuk yakni Dinas Pertanian memberikan atau menyalurkan bantuan baik berupa bibit dan pupuk kepada kelompok tani. Tujuannya yaitu agar para petani yang tergabung dalam kelompok tani tersebut bisa meningkatkan hasil produksinya. Oleh karena itu sangatlah penting pemberian bantuan bibit dan pupuk ini kepada kelompok tani demi pengembangan produktivitas pertanian.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gowa terkait dengan peranan Dinas Pertanian dalam pemberian bantuan bibit dan pupuk kepada kelompok tani:

"iya jadi terkait dengan pemberian bantuan bibit maupun bantuan pupuk kepada kelompok tani itu setiap tahunnya kami dari Dinas Pertanian memberikan bantuan tersebut secara bergiliran kepada kelompok tani yang ada di kecamatan Manuju. Dan bukan cuma di kecamatan Manuju saja diberikan secara bergiliran tapi semua kecamatan yang ada di Gowa ini. Penyaluran atau pemberiannya itu dilaksanakan menjelang musim tanam, dan melibatkan produsen pupuk dan bibit, pengawas yang sengaja kami tunjuk untuk mengawasi penyaluran bantuan tersebut, serta kelompok tani itu sendiri". (Wawancara, HZ).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gowa terkait dengan peranan dinas pertanian dalam pemberian bantuan bibit dan pupuk kepada kelompok tani maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian telah

memberikan bantuan bibit dan pupuk kepada kelompok tani yang ada di kecamatan Manuju secara bergiliran yang melibatkan produsen bibit dan pupuk, pengawas dari Dinas Pertanian, serta kelompok tani itu sendiri.

3) Bantuan Teknologi Pertanian;

Bantuan teknologi pertanian merupakan pemberian berupa alat-alat pertanian oleh pihak tertentu kepada petani. Salah satu instansi yang bersentuhan dengan petani yaitu Dinas Pertanian diharapkan mampu menjalankan perannya dalam memberikan bantuan teknologi pertanian kepada kelompok tani. Agar para petani yang tergabung dalam kelompok tani tersebut bisa berkurang biaya maupun waktunya ketika mendapatkan dan menggunakan teknologi pertanian.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gowa terkait dengan peranan Dinas Pertanian dalam pemberian bantuan teknologi pertanian kepada kelompok tani di Kecamatan Manuju:

"Iya jadi kami dari dinas pertanian tentunya sebelum memberikan bantuan teknologi pertanian terhadap kelompok tani di kecamatan Manuju terlebih dahulu kami melakukan pengamatan terhadap kelompok tani yang ada disana, tujuannya yaitu untuk mengetahui bentuk teknologi pertanian yang seperti apa yang dibutuhkan oleh petani. Karena jangan sampai kita memberikan bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok tani. Bantuan teknologi pertanian ini berupa hand traktor, pompa air, handsprayer, embun, serta alat pertanian yang lain. Dan bantuan seperti ini sering kami berikan pada kelompok tani yang ada disana. Mekanismenya juga kami gilir setiap tahunnya ada beberapa kelompok tani yang kami

berikan bantuan teknologi tersebut, kemudian tahun depannya lagi kelompok tani yang belum dapat yang akan kami berikan". (Wawancara, HZ).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kadis Pertanian Kabupaten Gowa terkait dengan peranan Dinas Pertanian dalam pemberian bantuan teknologi pertanian kepada kelompok tani maka dapat disimpulkan bahwa sebelum Dinas Pertanian memberikan bantuan teknologi pertanian, terlebih dahulu melakukan pengamatan pada kelompok tani yang akan diberikan bantuan di Kecamatan Manuju. Tujuannya yaitu agar bisa lebih mengetahui bentuk teknologi pertanian yang seperti apa yang dibutuhkan oleh kelompok tani.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Pemberdayaan kelompok tani yang meliputi pelatihan dan penyuluhan, bantuan bibit dan pupuk, dan bantuan teknologi pertanian yang diberikan kepada kelompok tani merupakan suatu upaya untuk bagaimana meningkatkan dan mengembangkan potensi pertanian. Namun didalam langkah atau upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian terkait dengan pemberdayaan kelompok tani tentunya ada faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat.

a. Faktor Pendukung;

Sebagai faktor pendukung tentunya menjadikan pemerintah Daerah semakin mudah dalam proses pemberdayaan masyarakat (Baca: Kelompok tani di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa), berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air terkait dengan faktor yang mendukung Dinas Pertanian dalam melakukan pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Manuju:

"adapun faktor yang mendukung kami sehingga bisa melaksanakan

pemberdayaan kelompok tani yaitu adanya bantuan dari pemerintah pusat, pemda, dan Dinas Pertanian provinsi Sul-Sel yang terus bekerja sama dan membantu kami di dinas kabupaten. Kemudian ketika kami dari Dinas Pertanian melakukan atau memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada kelompok tani di Kecamatan Manuju mereka juga selalu berpartisipasi dengan baik dan cukup antusias dalam mengikuti pelatihan dan penyuluhan". (Wawancara, SG).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air terkait faktor pendukung dalam pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Manuju maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa yang menjadi faktor pendukung Dinas Pertanian dalam melakukan pemberdayaan kelompok tani yaitu adanya bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemda dan Dinas Pertanian Provinsi Sul-Sel. Serta dalam melakukan pelatihan dan penyuluhan di Kecamatan Manuju, kelompok tani juga berpartisipasi dengan baik dan cukup antusias.

b. Faktor Penghambat

Berbeda dengan faktor pendukung, hadirnya faktor penghambat yang tidak sesuai dengan harapan di lapangan tentunya menjadi kendala dalam mencapai tujuan pemerintah Daerah, namun hal ini tidak menjadikan pemerintah Daerah menyerah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan Kadis Pertanian Kabupaten Gowa terkait dengan faktor penghambat Dinas Pertanian dalam melakukan pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Manuju:

"iya jadi yang menjadi hambatan kami dalam melakukan pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Manuju yaitu dalam

pemberian pelatihan dan penyuluhan masih banyak kelompok tani yang tidak mau untuk mengaplikasikan apa yang didapatkan dari pelatihan dan penyuluhan karena mereka masih mempertahankan cara-cara tradisionalnya dalam bertani. Dan ini juga masih menjadi kendala kami di seluruh Kecamatan yang ada di Gowa, meskipun sudah banyak juga dari mereka yang mengikuti apa-apa yang kita berikan dalam pelatihan atau penyuluhan". (Wawancara, HZ).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Kadis Pertanian Kabupaten Gowa terkait dengan faktor penghambat Dinas Pertanian dalam melakukan pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Manuju maka dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan pelatihan dan penyuluhan masih banyak dari anggota kelompok tani yang menggunakan cara-cara tradisional dalam bertani, meskipun dari Dinas Pertanian sendiri telah memberikan pelatihan dan penyuluhan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang peranan Dinas Pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian dalam melaksanakan pemberian pelatihan dan penyuluhan, bantuan bibit dan pupuk, dan bantuan teknologi pertanian sudah berjalan atau terlaksana tetapi belum maksimal. Itu disebabkan oleh masih kurangnya jumlah kuota bantuan yang didapatkan oleh kelompok tani dari Dinas Pertanian.

Adapun faktor pendukung Dinas Pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Manuju yaitu adanya bantuan dari Pemerintah

Pusat berupa alokasi anggaran dalam APBN, bantuan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten. Selain itu dalam pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani yang dilakukan oleh Dinas Pertanian para kelompok tani juga selalu antusias ketika ada pelatihan dan penyuluhan. Kemudian faktor yang menghambat Dinas Pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Manuju adalah pengaplikasian dari apa yang didapatkan oleh kelompok tani dari pelatihan dan penyuluhan itu masih kurang karena kebanyakan masih menggunakan pola-pola tradisional dalam bertani. Selain itu kurangnya stok bibit maupun pupuk dari produsen juga masih kurang sehingga petani juga harus lebih bersabar dalam menunggu giliran bantuan oleh Dinas Pertanian.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka yang menjadi saran dari penulis yaitu Dinas Pertanian seharusnya lebih memaksimalkan jumlah kuota bantuan-bantuan yang diberikan kepada kelompok tani yang ada di Kecamatan Manuju agar para kelompok tani bisa lebih sejahtera dan terbantu dengan bantuan tersebut

Selanjutnya para kelompok tani yang ada di Kecamatan Manuju seharusnya bisa mengimplementasikan apa-apa yang mereka dapatkan dalam pelatihan dan penyuluhan yang diberikan oleh Dinas Pertanian serta diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam pemberdayaan kelompok tani untuk lebih maksimal dalam melaksanakan seluruh tahapan pemberdayaan kelompok tani agar tercipta petani yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Ambar Teguh . 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke 3*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djohani, R. (2003). *Partisipasi, Pemberdayaan, dan Demokrasi Komunitas*. Bandung: Studio Driya Media.
- Kaho, Josep Riwu. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta. 1990
- Saptana, Saktyanu KD ,Sri Wahyuni ,Ening Ariningsih dan Valeriana Darwis. 2004. *Integrasi Kelembagaan Forum KASS dan Program Agropolitan dalam rangka pengembangan sayuran sumatera*. Pusat penelitian sosial ekonomi. Bogor.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- Suradisastra, K. 2008. *Strategi pemberdayaan kelembagaan petani. forum penelitian agro ekonomi*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor

Dokumen :

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/KPTS/OT.160/4/2007

Undang-Undang No 32 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah